

## Analisis Etika Lembaga Legislatif Perspektif Fiqih Dusturiyah

Syafidillah Sastri Syam<sup>1</sup>, Nurfadillah<sup>2</sup>, Kurniati<sup>3</sup>

Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum dan Syariah,  
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

E-mail: 10200122050@uin.alauddin.ac.id<sup>1</sup>, 10200122060@uin.alauddin.ac.id<sup>2</sup>,  
197406272006042002@uin.alauddin.ac.id<sup>3</sup>

**Abstract.** *Political ethics As a result, those who want a government that is fair and based on ethical values have a lot to learn from what happened. The goal is that they can create peace by upholding the values of justice. The research method used is the library method. If resistance is not based on proper moral and ethical principles, it will lead to uncertainty. Its power will inevitably collapse, especially if the leader does not instill moral values. Therefore, good rulers are those who create happiness rather than the opposite. The legislative body is in charge of making or drafting laws.*

**Keywords.** *Political Ethics, Legislative Analysis*

**Abstrak:** Etika politik Akibatnya mereka yang menginginkan sebuah pemerintahan yang adil dan didasarkan pada nilai – nilai etika harus banyak belajar dari apa yang terjadi. Tujuannya mereka dapat menciptakan kedamaian dengan menjunjung tinggi nilai – nilai keadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kepustakaan. Jika perlawanan tidak didasarkan pada prinsip moral dan etika yang tepat, itu akan menyebabkan ketidakpastian. Kekuasaannya pasti akan runtuh, terutama jika pemimpinnya tidak menanamkan nilai moral. Oleh karena itu, penguasa yang baik adalah mereka yang menciptakan kebahagiaan dari pada sebaliknya. Lembaga legislative bertugas untuk membuat atau merancang undang-undang.

**Kata kunci:** Etika Politik, Analisis Lembaga Legislatif

### PENDAHULUAN

Etika dalam berpolitik sangat diperlukan karena etika lebih utama daripada ilmu, orang yang beretika sudah pasti berilmu sedangkan orang yang berilmu belum tentu mempunyai etika. Negara Indonesia adalah negara hukum (rechstaat) bukan negara. Kekuasaan (machstaat). Konsekuensi sebagai negara hukum adalah bahwa semua sendi kehidupan berbangsa dan bernegara yang ada di negara Indonesia haruslah berdasarkan dan dilaksanakan sesuai hukum. Manusia memiliki etika dan moral, tetapi sayangnya tidak semua orang menyadari hal itu, sehingga sering kali mereka terjebak dalam hal-hal yang menyimpang dari nilai kemanusiaannya sebagai manusia yang beretika dan bermoral.

Hukum di Indonesia adalah undang-undang. Undang-undang adalah dasar legislasi bagi seluruh elemen negara, khususnya bagi penyelenggara negara dalam menyelenggarakan dan mengelola negara. Dalam ketatanegaraan sejarah Islam yang dipraktikkan umat Islam dalam sistem pemerintahan dan kenegaraan Islam maka ada beberapa aspek yang disajikan dalam siyasah dusturiyah. Hal ini juga dibahas konsep-konsep konstitusi dalam suatu negara (Undang- Undang Dasar Negara dan Sejarah Lahirnya Perundang-Undangan dalam suatu Negara).

Analisis sangat diperlukan untuk kemajuan suatu bangsa. Menganalisis etika setiap

calon lembaga legislatif itu perlu karena kita butuh dipimpin atau diwakili oleh orang yang mempunyai etika yang baik atau bagus, Amanah, dan bertanggungjawab. Analisis ini dilakukan guna kepentingan ke depannya agar tidak terjadi pelengseran kekuasaan atau biasa disebut dengan kudeta, dan masyarakat tidak merasa ter zalimi oleh penguasa karena sudah mencari tahu bagaimana karakter dan watak calon Lembaga legislatif tersebut.

Penting untuk mencari tahu bagaimana karakter calon lembaga legislatif karena pada zaman sekarang, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak di inginkan oleh masyarakat. Jika yang terpilih anggota legislatif yang amanah, bertanggungjawab, dan baik etikanya dan senantiasa takut akan Tuhan-Nya maka tidak diragukan lagi bahwa masyarakat akan mendapatkan hak yang sudah ditetapkan. Lembaga legislatif keberadaannya sangat penting di negara Indonesia, karena Lembaga legislatif ini cukup penting perannya dalam negara Indonesia.

Salah satu faktor yang menyebabkan peningkatan kebobrokan etika dan moral di suatu bangsa adalah orang-orang yang menganut agamanya tidak menjalankannya dengan baik karena setiap agama pada dasarnya mengajarkan kebenaran, agama tidak boleh disalahkan atas kebobrokan etika bangsa karena agama adalah komponen yang sangat penting dari moral bangsa. Undang- undang adalah manifestasi hukum yang berfungsi sebagai dasar hukum yang berfungsi sebagai dasar hukum bagi seluruh elemen negara, terutama untuk penyelenggaraan pemerintahan.

Menurut Andrew Heywood, politik adalah kekuatan, kekuasaan atau setiap politik berkaitan dengan kekuatan, seperti yang disebutkan dalam bukunya “Kekuasaan, Otoritas, dan Legitimasi”. Buku Harold Lasswell berjudul “Politik siapa yang mendapatkan apa, kapan, dan Bagaimana” Adapun Politik dalam tradisi Islam bukan sekedar pertarungan untuk kekuasaan, itu adalah proses didasarkan pada prinsip moral.

Haryatmoko berpendapat bahwa Upaya untuk menciptakan tatanan politik yang berkeadilan, bermoral, dan rasional harus dimulai dengan menempatkan dimensi moral dan etika sebagai dasar rasional kegiatan politik. Dari perspektif agama Islam, Allah swt. adalah Kekuatan atau disebut juga sebagai Kekuasaan. Kekuasaan kemudian diberikan kepada manusia sebagai khalifah Allah dan kepada seseorang yang dipilih, baik untuk Masyarakat maupun individu. Kekuasaan ini termasuk kekuasaan politik.

Kekuasaan legislatif atau Al-sulthah al Tashri'yah adalah kekuasaan terpenting dalam pemerintahan Islam, karena ketentuan dan ketetapan yang dikeluarkan Lembaga legislatif ini akan dilaksanakan secara efektif oleh Lembaga eksekutif dan dipertahankan oleh Lembaga yudikatif atau peradilan. Studi ini dilakukan karena alasan historis, kehidupan politik dalam Sejarah peradaban Islam dan politik Indonesia dimainkan oleh umat Islam. Selain itu

munculnya hadis palsu yang dibuat oleh orang muslim atau non muslim dengan alasan politik.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kepustakaan menggunakan data. Penelitian ini juga bersifat relatif singkat dan menggunakan dokumen penelitian sebelumnya. Ada beberapa hal dalam penulisan yang diketahui tentang “Analisis Lembaga Legislatif Perspektif Fiqh Dusturiyah”. Penelitian dengan metode ini agar dapat mengetahui bagaimana lembaga legislatif terdahulu sampai sekarang. Metode kepustakaan yang digunakan melalui jurnal atau artikel terdahulu dan membandingkan antara lembaga legislatif dahulu dan lembaga legislatif sekarang. Dan membahas mengenai bentuk- bentuk lembaga legislatif perspektif fiqh dusturiyah dan peran lembaga legislatif fiqh dusturiyah. Penelitian digunakan untuk mengetahui bagaimana bentuk dan peran lembaga legislatif perspektif fiqh dusturiyah. Apakah sama bentuk dan peran lembaga legislatif dahulu dan sekarang.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Bentuk Etika Politik Lembaga Legislatif Perspektif Siyasah Dusturiyah**

Etika politik lembaga legislatif dalam perspektif siyasah dusturiyah (politik konstitusional Islam) melibatkan prinsip-prinsip etika yang selaras dengan nilai-nilai keislaman dan bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang adil dan transparan.

Dalam Islam, keadilan merupakan prinsip utama dalam pemerintahan. Legislator harus memastikan bahwa undang- undang yang dibuat adil bagi semua kelompok dalam masyarakat tanpa memandang suku, agama, atau status sosial. Contohnya, kebijakan fiskal yang progresif dapat diadopsi untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial (Naufal, 2020). Yang dalam implementasi praktis dapat dilakukan dengan menetapkan Undang-Undang yang melindungi hak-hak minoritas dan mengembangkan kebijakan yang mempromosikan distribusi sumber daya yang adil merupakan langkah penting dalam membangun masyarakat yang inklusif dan berkeadilan. Kejujuran atau *sidq* dalam politik adalah kunci utama dalam menjalankan legislasi yang transparan. Legislator dituntut untuk jujur dan terbuka dalam setiap tahap legislasi, memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada publik adalah benar dan tidak dimanipulasi.

Implementasi praktis dari kejujuran ini dapat dilakukan dengan cara mempublikasikan hasil rapat dan keputusan legislatif secara terbuka. Selain itu, keterbukaan dalam proses pemilihan umum dan pelaporan keuangan kampanye harus didorong untuk memastikan bahwa publik memiliki akses yang jelas terhadap informasi yang relevan.

Amanah atau tanggung jawab juga merupakan prinsip penting dalam politik. Menjalankan amanah berarti legislator harus mengedepankan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi atau golongan. Mereka harus bekerja dengan integritas tinggi dan bertanggung jawab atas tindakan mereka.

Untuk mengimplementasikan prinsip amanah ini, kebijakan anti-korupsi yang ketat perlu diterapkan. Selain itu, menyediakan mekanisme pelaporan bagi warga negara untuk mengadukan penyalahgunaan wewenang akan membantu memastikan bahwa legislator tetap bertanggung jawab dan transparan dalam menjalankan tugas mereka.

### **Musyawaharah (Syura)**

Syura adalah prinsip konsultasi dan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Legislator harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses legislasi untuk memastikan kebijakan yang dibuat mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Implementasi praktisnya yaitu membentuk dewan atau komite yang melibatkan masyarakat sipil dalam pembahasan undang-undang, mengadakan dengar pendapat publik sebelum mengesahkan undang-undang penting.

Dalam kebijaksanaan (hikmah) dalam merumuskan undang-undang memerlukan pemahaman mendalam tentang kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Legislator harus bijak dalam merespons perubahan zaman dan tantangan baru. Dalam implementasi praktis dengan mengadakan penelitian dan studi dampak sebelum menerapkan kebijakan baru, menyusun kebijakan yang fleksibel dan dapat disesuaikan dengan perkembangan kondisi global.

Dalam kesejahteraan umum (masalah ammah) tujuan utama dari undang-undang dan kebijakan haruslah untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Legislator harus berfokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Sedangkan pplementasi praktisnya ialah menyusun anggaran yang prioritaskan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, mengembangkan program bantuan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan.

Dalam melakukan akuntabilitas (hisbah), legislator harus siap diaudit dan dimintai pertanggungjawaban atas keputusan dan tindakan mereka. Mekanisme akuntabilitas penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Implementasi praktis dengan membentuk badan independen yang bertugas mengawasi kinerja dan keuangan legislatif dan menerapkan sistem sanksi yang tegas bagi legislator yang melanggar aturan.

Komitmen terhadap Hukum (Iltizam bi al-Qanun), mematuhi hukum berarti legislator harus menjunjung tinggi supremasi hukum dan memastikan bahwa undang-undang yang dibuat tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Implementasi praktis dengan melakukan uji

kesesuaian undang-undang dengan prinsip-prinsip syariah sebelum pengesahan, menjamin bahwa legislasi tidak melanggar hak-hak dasar yang diakui secara internasional. Dengan mempraktikkan etika-etika tersebut, lembaga legislatif dapat berfungsi secara efektif dan efisien dalam menciptakan pemerintahan yang bertanggung jawab, transparan, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan ajaran Islam.

Pemimpin yang memenuhi persyaratan minimal suara dipilih berdasarkan dukungan suara terbanyak meskipun praktik politik uang atau hal lain terkadang terlibat dalam proses perolehan suara, hal ini tidak selalu menjadi perhatian utama. Namun, jika seorang pemimpin terpilih melalui proses yang memerlukan pengeluaran besar, mereka mungkin berusaha untuk mendapatkan kembali modal mereka dan mungkin terlibat dalam perilaku koruptif. Dengan melihat keadaan politik yang disebutkan atas, menjadi jelas bahwa prinsip-prinsip etika politik tidak lagi relevan, bahkan mungkin telah hilang. sering kali etika politik hanya dibicarakan dari sudut pandang teoretis dalam politik, terlihat seolah-olah. Politik tidak hanya kompetisi untuk kekuasaan itu juga harus didasarkan pada prinsip moral.

Sebagai bagian penting dari agama Islam, fiqhi memberikan berbagai standar etika politik yang dapat diterapkan pada politik modern. Menurut fiqhi, berbagai prinsip membentuk etika politik, seperti keadilan, integritas, konsultasi {shura}, dan akuntabilitas. Pemimpin dan politis dimotivasi oleh prinsip-prinsip itu untuk bertindak dengan jujur, bertanggung jawab, dan menghormati pandangan orang lain. Dalam politik, fiqhi juga menekankan pentingnya moralitas dan integritas pribadi. Mereka juga mengajarkan bahwa kekuasaan harus digunakan untuk kepentingan individual atau kelompok (Begovic, 2022).

Etika politik tidak dapat mengkhotbahi para politikus, tapi dapat menawarkan pegangan normatif dan orientasi bagi mereka yang ingin menilai kualitas tatanan politik dan kehidupan politik berdasarkan martabat (Hasibuan et al., 2018). Etika politik dimasukkan ke dalam Fiqh Siyasah Dusturiyah karena mengatur hubungan antara warga negara dengan lembaga-lembaga di luar batas administratif negara tersebut. Selain itu, untuk memperkecil ruang lingkup Fiqh Siyasah Dusturiyah, etika politik dimasukkan ke dalam Bidang Siyasah Tasri'iyah karena mencakup masalah ahlu hali wal aqdi, yang merupakan representasi dari masalah rakyat. Undang-undang Nasional, Peraturan Pelaksanaan, Peraturan Daerah, dan hubungan muslim lainnya.

Jadi penulis berpendapat bahwa dalam pembentukan peraturan harus memerhatikan apakah peraturan yang dibuat atau diberlakukan kepada masyarakat atau seluruh warga negara sudah dipastikan tidak merugikan warga negara. Jadi alangkah lebih baiknya jika peraturan yang dibentuk sesuai dengan kondisi dan sesuai dengan kebutuhan yang ada di masyarakat.

Dan etika lembaga legislatif dahulu berbeda dengan etika lembaga legislative yang sekarang, dimana lembaga legislatif sekarang lebih maju atau lebih terdepan dibanding dengan lembaga legislate dahulu.

### **Peran Etika Lembaga Legislatif Perspektif Siyasa Dusturiyah**

Peran etika politik memiliki fungsi yang sangat penting dalam mendorong praktik reformasi dalam tata kelola pemerintahan melalui penegakan integritas dan nilai etika. Karena dalam praktiknya Para pemimpin menjalankan wewenang jika mereka dapat memberikan alasan pembenaran bagi hak mereka berkuasa atas orang lain. Membuat kebijakan berkaitan erat dengan hak moral untuk menentukan kebijakan membuat penilaian, mengeluarkan perintah dan menyelesaikan konflik (Unesco, 2015).

Selain itu etika sering disamakan dengan moral, yang dalam Bahasa Islam biasa dikenal dengan sebutan sebagai akhlak. kedua istilah ini berkaitan dengan tindakan manusia yang sadar yang menentukan apa baik dan buruk. Etika Politik tidak hanya masalah perilaku politikus. Berhubungan juga dengan praktik institusi sosial, hukum, komunitas, struktur-struktur sosial, politik, ekonomi. Etika Politik memiliki tiga dimensi: tujuan, sarana dan aksi politik itu sendiri. Perilaku politikus hanya salah satu dimensi etika politik. Kehendak baik perlu ditopang institusi yang adil. Kehendak baik berfungsi mempertajam makna tanggung jawab, sedangkan institusi (hukum, aturan, kebiasaan, lembaga sosial) berperan mengorganisir tanggung jawab. Dimensi tujuan merumuskan dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat dan hidup damai yang didasarkan pada kebebasan dan keadilan. Keprihatinan utama ialah upaya penerapan kebijakan umum dalam manajemen publik. Dalam Negara demokratis pemerintah mempunyai komitmen terhadap penyelenggaraan negara dan bertanggung jawab atas komitmen tersebut: kesejahteraan masyarakat dan hidup damai.

Menghadapi masalah-masalah negara, kebijakan umum pemerintah harus terumus jelas dalam hal prioritas, program, metode dan pendasaran filosofisnya. Lalu menjadi transparan apa yang harus dipertanggung jawab kan. Atas dasar kebijakan umum ini wakil rakyat dan kelompok-kelompok masyarakat bisa membuat evaluasi pelaksanaan, kinerja pemerintah dan menuntut pertanggung jawaban. Kejelasan tujuan yang terumus dalam kebijakan publik akan menunjukkan ketajaman visi seorang pemimpin dan kepedulian suatu partai politik terhadap aspirasi masyarakat (Silawana, Kurniati & Rahman, 2023). Dimensi moralnya terletak pada kemampuan menentukan arah yang jelas kebijakan umum dan akuntabilitasnya.

Perbedaannya terletak pada tolak ukur yang menentukan seberapa Baik atau buruknya Tindakan itu. Agama Islam yang berasal dari al-Qur'an dan hadis , yang berfungsi sebagai standar untuk perbuatan baik atau buruk. Moral, disisi lain, bergantung pada kesepakatan

Masyarakat dalam menata kehidupan Bersama dan etika, bergantung pada akal atau rasionalitas. Pengertian etika Islam [akhlak] adalah suatu pengetahuan yang baik dan yang buruk yang menerangkan apa yang seharusnya dilakukan (Hamsah, Marilang & Kurniati, 2021).

Karena moral individual merupakan hubungan antara keyakinan dan Tindakan seseorang, etika politik bukan hanya masalah moral individual. Jika seseorang memiliki perspektif tertentu, mereka dapat menerapkannya secara langsung dalam tindakan mereka. Tindakan dapat dilakukan jika dituntun norma dipenuhi etika politik juga, di sisi lain, merupakan masalah etika sosial yang tidak dapat dilepaskan dari tindakan kolektif, struktur sosial, dan sebagian besar anggota masyarakat. Ide bagus seseorang belum tentu dapat diterapkan dalam tindakan kolektif sehingga proses persuasif diperlukan agar ide tersebut diterima oleh masyarakat untuk mencapai kesepakatan, visi dan tindakan harus melewati proses mediasi dengan menggunakan nilai-nilai untuk mencapai kesepakatan, visi dan tindakan harus berinteraksi melalui proses mediasi melalui nilai-nilai seperti demokrasi, keadilan, solidaritas dan kebebasan (Sapti et al., 2019).

Islam juga sebagai agama yang mengutamakan kemanusiaan, bukan hanya retorika. Karena itu, gagasan politik islam didasarkan pada aktualisasi iman dalam islam sebagai dasar untuk pembentukan etika politik bukanlah suatu system yang kompleks; sebaliknya, itu dapat didefinisikan secara sederhana sebagai kumpulan prinsip moral yang harus diterapkan dalam tindakan politik individu, undang-undang, hukum dan kebijakan pemerintahan. Namun, dalam sistem demokratis, rakyat memilih pemimpin mereka, tetapi terkadang keputusan dan kebijakan politik mengabaikan hati nurani karena lebih suka melayani kepentingan pribadi dari pada kepentingan rakyat (Shobron, 2012). Al-Qur'an telah menetapkan sumber keuangan untuk jaminan sosial bagi mereka yang membutuhkannya (Miranu, 2021). Semua definisi ini memiliki tujuan yang sama, mengelola dan mengatur pemerintahan negara untuk kemaslahatan rakyatnya dan di berdasarkan prinsip keadilan dan sebagian dari hukum Islam.

Indonesia memiliki empat produk pemikiran hukum: fikih, fatwa ulama, pemikiran hukum, dan yurisprudensi Menurut Abul Haq Anshari dalam Islamic Ethic (Hariyani, 2012). Peran Etika Lembaga Legislatif Dahulu sebagai berikut:

### **Kekuasaan Eksekutif**

Pada masa lalu, lembaga legislatif seringkali terlibat dalam praktik yang tidak etis karena memiliki kekuasaan yang eksekutif. Hal ini dapat dilihat dalam laporan Pertanggungjawaban Mandataris MPR pada SU MPR di era Orde Baru, yang menunjukkan dominasi kekuasaan dan nyaman politik. Hal ini disebabkan lemahnya pengawasan pada masa

lalu, pengawasan dan kontrol terhadap lembaga legislatif kurang efektif. Hal ini dapat dilihat dalam praktik yang tidak etis dan korupsi yang terjadi di lembaga legislatif atau DPR, yang menggugurkan tesis Max Weber tentang politik sebagai tugas jabatan dan panggilan hidup.

Pada masa lalu, lembaga pengawas etika masih kurang diperhatikan. Hal ini dapat dilihat dalam praktik yang tidak etis dan korupsi yang terjadi di lembaga legislatif atau DPR, yang tidak memiliki lembaga pengawas yang efektif. Peran Etika Lembaga Legislatif Sekarang Pengawasan dan Kontrol : Sekarang, lembaga legislatif lebih fokus pada pengawasan dan kontrol yang lebih efektif, seperti melalui undang-undang PTUN yang mengatur pelaksanaan administrasi negara secara yudikatif.

### **Legislasi Etik**

Saat ini, upaya legislasi etik telah dilakukan untuk mengeliminasi tindakan yang tidak etis dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam pengambilan keputusan. Hal ini dapat dilihat dalam tulisan tentang legislasi etik sebagai bagian dari reformasi legislatif. Sekarang, telah dibentuk lembaga pengawas etika, seperti Badan Kehormatan DPR-RI, yang bekerja berdasarkan beberapa Undang-undang, surat keputusan, dan tata tertib DPR-RI. Saat ini, lembaga legislatif berupaya meningkatkan kualitas aparturnya dengan memberikan pelatihan dan pengembangan yang lebih baik. Hal ini dapat dilihat dalam peran lembaga legislatif dalam mengawasi pelaksanaan administrasi negara secara yudisial.

Dalam sintesis, perbedaan peran lembaga etika lembaga legislatif dulu dan sekarang dapat dilihat dalam meningkatnya pengawasan dan kontrol, legislasi etik, kualitas aparat, dan peran lembaga etika pengawas yang lebih fokus pada transparansi dan akuntabilitas. Jadi penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam sistem pemerintahan lembaga legislatif memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan undang-undang dan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang. Lembaga legislatif juga bertujuan untuk memperkuat dan mempertahankan demokrasi serta mewakili suara rakyat. Siyasah dusturiyah membahas masalah perundang-undangan negara, mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat dan mengatur mengenai pembagian kekuasaan.

### **KESIMPULAN**

Etika politik dalam menjaga integritas sosial dan tata kelola pemerintahan yang baik. Peran Islam dalam konteks politik dan pendidikan, dengan menekankan prinsip-prinsip etika politik dalam Islam seperti keadilan, musyawarah, perdamaian, dan kesejahteraan. Etika politik memiliki peran vital dalam menjaga keberlangsungan masyarakat dan negara, sementara Islam

memberikan landasan moral yang penting dalam proses politik dan pendidikan. Kesimpulan ini memberikan wawasan tentang hubungan antara etika, politik, dan agama dalam konteks sosial dan politik yang lebih luas.

## DAFTAR RUJUKAN

- A Fikri Thia Naufal, “Etika Politik Menurut Mahfud MD Dalam Perspektif Fiqh Siyasah”
- Andi Sani Silwana, Kurniati, and Abd. Rahman R, “Peran Fatwa Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Di Indonesia,” *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 4, no. 1 (2023): 104–10.
- Hamsah Hasan, Marilang Marilang, and Kurniati Kurniati, “Pengaruh Sosial Politik Terhadap Pembentukan Hukum Islam,” *KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan* 14, no. 2 (2021): 122–36.
- Jurnalmap Map et al., “Punahnya Etika Moral Elit Politik Di Indonesia,” *MAP (Jurnal Manajemen Dan Administrasi Publik)* 1, no. 04 (2019): 458–
- Kurniati, Kurniati. “Perkembangan Sosial Politik Dalam Tatanan Pembentukan Hukum Islam.” *Al-Fikr* 17, no. 1 (2013): 176–89. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/alfikr/article/download/2276/2209>.
- M Eza Helyatha Begouvic, “Pembuatan Undang-Undang Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah,” *Jurnsl Fakultas Hukum Universitas Kader Bangsa* 1, no. 88 (2022): 58–75.
- Mujiyem Sapti et al., “No Analisis Fikih Siyasah Dusturiyah Terhadap Proses Pembentukan Peraturan Perundang–Undangan Di Indonesi,” *Jurnal Sains Dan Seni ITS* 53, no. 1 (2019): 1689–99.
- Putu Ari Saruhum Hasibuan, Mei Indrawati, and Cathrine Sri Hartati, “Punahnya Etika Moral Elit Politik Di Indonesia,” *MAP (Jurnal Manajemen Dan Administrasi Publik)* 1, no. 04 (2018): 458–63.
- Sudarno Shobron, “Strategi Dan Etika Berpolitik Dalam Kajian Islam (Kajian Terhadap Kitab Shahih Muslim),” *Ishraqi : Jurnal Penelitian Keislaman* 10, no. 1 (2012): 14–30.
- Triantoro Miranu, “Peran Etika Politik Dalam Menegakkan Demokrasi Konstitusional,” *Cakrawala Pendidikan* 25, no. 1 (2021): 98–106.
- UNESCO, “Etika Politik Dalam Sejarah Umat Islam,” *Universal Declaration of Human Rights* III, no. 1 (2015): 1– 11.